



# SEKOLAH TINGGI THEOLOGI IKAT

d/h INSTITUT KEGURUAN ALKITAB DAN THEOLOGIA

TERAKREDITASI BAN-PT : 29/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021

Alamat : Jl. Rempoa Permai No.2, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12330

Telp/Fax : 021-7342926 / 021-7351731; Email : sttikat12@gmail.com; Website : www.sttikat.ac.id

Sarjana Prodi Theologi Akreditasi B  
Sarjana Prodi PAK) Akreditasi B

Magister Prodi Kepemimpinan Akreditasi B  
Magister Prodi PAK Akreditasi B

Doktor Theologi Akreditasi C

Nomor : 397/A/STT IKAT/VIII/2022  
Lamp :  
Perihal : Undangan sebagai Narasumber

Jakarta, 03 Agustus 2022

Kepada Yth,  
DR. Ir. Batara M Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA  
STIE Indonesia BANKING School

Di  
Tempat

Salam sejahtera,

Sehubungan dengan Kolaborasi Sekolah Tinggi Theologi IKAT Jakarta bersama dengan Universitas Padjajaran Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia *BANKING School* dan Universitas Pakuan Bogor melalui kegiatan webinar “*Kolaborasi adalah Kunci*” maka dengan ini mengundang DR. Ir. Batara M Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA dari STIE Indonesia *BANKING School* berkenan sebagai narasumber pada tema “*Penulisan Opini Ilmiah*” dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022  
Pukul : 13.00 sd 15.00 WIB  
Ruang : Virtual Zoom

Doa dan harapan kami kiranya bapak berkenan memenuhi undangan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Salam Hormat dan Kasih  
Ketua/Rektor STT IKAT



  
Dr. Jimmy M.R. Lumintang, MBA., M.Th

Tembusan Yth,

1. Badan Penjaminan Mutu Internal STT IKAT
2. Kabid Akademik STT IKAT
3. Kepala Prodi S1 Teologi
4. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung 40132 / Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363  
Telp. (022) 2509055, (022) 2511426 Laman: www.feb.unpad.ac.id Email: info.feb@unpad.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 12159/UN6.B.2/KP.010.06/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran memberi tugas kepada:

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Sebagai
1	Dr. Ir. Batara M. Simatupang, M.T., M.Phil., CIMBA	-	Ketua Bidang Perbankan di Asosiasi Analisis Pasar Investasi dan Perbankan	Pembicara 1
2	Dian Wulandari	-	Kep. Pusat Pengembangan Karir & Tracer Study Universitas Pakuan	Pembicara 2
3	Dr. Kurniawan Saefullah, S.E., M.Ec. NIP 197405221998021001	Penata Tingkat I / III/d	Wakil Dekan 2 FEB Unpad	Pembicara 3
4	Dr. Donna Sampaleng, M.Pd.K., D.Th.	-	Ketua II STT IKAT	Moderator

dalam Acara Webinar Nasional Kolaborasi Riset Internasional, Penulisan Opini Ilmiah dan Growth Mindset “Kolaborasi adalah Koentji” yang akan dilaksanakan secara daring pada:

hari/tanggal : Jum’at / 12 Agustus 2022

waktu : pukul 13.00-15.00 WIB

Untuk mendukung terlaksananya Kampus berZona Integritas, segala pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Universitas Padjadjaran sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Bandung, 11 Agustus 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi,



12159/UN6.B.2/KP.010.06/2022

Dr. Kurniawan Saefullah, S.E., M.Ec.  
NIP 197405221998021001

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad;
2. Para Manajer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad;
3. Kepala Departemen Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad;
4. PUMK FEB Unpad

**Catatan :**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





# Certificate

Dengan hormat, diberikan kepada:

**Dr. Ir. Batara M. Simatupang, M.T., M.Phil., CIMBA**

Sebagai Pemateri

*Bagaimana Menulis Artikel Opini di Media Cetak/Elektronik Tier 1?*

**WEBINAR NASIONAL  
KOLABORASI RISET INTERNASIONAL,  
PENULISAN OPINI ILMIAH DAN GROWTH MINDSET  
Jakarta, 12 Agustus 2022**



**Dr. Jimmy M.R Lumintang, MBA., M.Th**  
Rektor/Ketua STT IKAT





# Bagaimana Menulis Artikel Opini di Media Cetak/Elektronik Tier 1?

Oleh Dr. Ir. Batara M Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA®

Disampaikan pada Webiner Nasional

“Kolaborasi Riset Internasional, Penulisan Opini Ilmiah dan Growth Mindset”

Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022



Fasilitator

Dr. Ir. Batara M Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA®



## Summary of Experiences

Batara M Simatupang is a Senior Lecture at STIE Indomesia Banking School (IBS) – Head of Banking Field on Association Investment Market and Banking Analyst (AIMBA) – President Director of Koperasi KMDT (Digital Cooperative) – Adjunct Faculty of LPPI , previously as Assistant Vice President and Senior Account Manager Corporate Banking Agro Based Group (Corporate Banking IV), PT Bank Mandiri Persero) Tbk., Expert Senior Trainer in Leadership, Entrepreneurship, Banking Risk Management, E-Business & CRM, Credit Portfolio, Banking Financial Management, Corporate Finance Strategy, Balance Score Card, and Excecution Strategic Management, Digital Banking dan Fintech. He is also as a writer on national news paper and magazine.

## Educational background



Maastricht, The Netherlands

**DR/DBA** (Doctor of Business Administration) 27/07/2007

**M.Phil.** (Master of Philosophy) 25/11/2005

**Finance and Banking**



Bandung, Indonesia

Program Pascasarjana  
Magister Teknologi (MT)  
Manajemen Industri, 21 Januari  
1996



Ujung Pandang, Indonesia

Ir. Teknik Manajemen  
Industri, 1991.



Medan, Indonesia

**DIII** (Diploma III),  
Teknik Elektro,  
Politeknik Universitas  
Sumatera Utara  
(**USU**), 1986.

# AGENDA

**1**

**PEMILIHAN TOPIK**

**2**

**PENULISAN**

**3**

**KESIMPULAN**



# Apa itu “OPINI”?

**OPINI: Seseorang penulis yang menyajikan pendapat mereka sendiri tentang topik tertentu.**

**Potongan OPINI adalah salah satu alat penting dalam komunikasi, karena memiliki kekuatan menjangkau khalayak yang luas dan memulai diskusi.**

**Siapapun boleh menulis OPINI.**

**TETAPI, menulis OPINI yang akan diterima pada Media Cetak TIER 1 dan benar-benar dibaca oleh KHALAYAK adalah sebuah TANTANGAN**

**Menulis Artikel:**

- Merupakan pergulatan pemikiran dari seorang ahli atas masalah yang sedang berkembang di masyarakat, dan
- Menempatkan artikel sebagai *intellectual exercise* (asah intelektual) → Growth Mindset

# TIPS Menulis “OPINI” Secara Umum 1

1. **TOPIK.** Memutuskan apa yang akan ditulis, Topik → menentukan nasib Artikel.
2. **SUBJECT.** Pilih subject yang diketahui dengan baik, → menulis dari pengalaman, | Anda seorang Profesional Pada Marketing jangan menulis tentang teknik marketing, kecuali anda sebagai pelaku secara teknis. Tulis mengenai sesuatu yang mengejutkan, *hot issues*, dan dapat dipahami oleh pembaca.
3. **JUDUL:** Judul dapat membuat atau menghancurkan seluruh artikel – Dalam lautan OPINI orang akan memutuskan untuk terus membaca jika judulnya menarik perhatian mereka (Kadang kala Editor mengubah judul sebelum diterbitkan, untuk membuatnya lebih kuat).
4. **DATA:** OPINI akan lebih kuat dengan data, terutama kalau menulis topik sains. OPINI penting, | tidak didukung oleh bukti yang relevan → OPINI tidak akan kuat.  
Contoh: “Utang dan Sosial Politik” (Kompas, 28/8/2017), saya memulai dengan mereferensi OxFam (2015) yang mengkalkulasi bahwa terdapat 62 orang yang menguasai aset sebesar 1,76 triliun dollar AS atau setara dengan jumlah aset yang dikuasai oleh 3,6 miliar orang atau setengah dari populasi dunia yang memiliki pendapatan paling rendah (kaum marjinal).



## TIPS Menulis “OPINI” Secara Umum 2

- 5. KOREKSI.** | Bagian OPINI anda sudah siap sekarang, TUNGGU! Jangan dikirim dulu, periksa ulanglah, siapa tau ada ejaan yang salah dan tata Bahasa yang dapat dengan mudah diidentifikasi dengan perangkat lunak Cobalah minta bantuan ke orang kedua/rekan membacanya – Anda sulit mengkoreksi tulisan Anda sendiri, jadi mata kedua selalu menjadi cadangan kedua.
- 6. SARAN TERAKHIR.** Bersiaplah untuk ditolak! Bahkan | Anda sudah menulis OPINI yang bagus dengan judul, tatabahasa, dan konten yang sempurna, amasih ada kemungkinan Artikel anda tidak dipublikasikan, ada hit dan miss. Ini sangat mengecewakan, biasanya ada unpan balik kenapa Artikel anda ditolak. |Tidak ada kabar hingga sebulan, maka bersiaplah menulis artikel baru atau mendaur ulang Artikel yang sudah disubmit dan mengirimkannya ke Surat Kabar lain.

# AGENDA

1

PEMILIHAN TOPIK

2

PENULISAN

3

KESIMPULAN



# Menulis ARTIKEL OPINI (OP-EDS) 1

## (opposite the editorial page)

- 1. TEPAT WAKTU.** Op-Eds anda harus membahas topik yang berkaitan dengan peristiwa terkini, tren atau membahas pendapat orang lain. Ketepatan waktu (momentum) sangat penting dalam mengirimkan op-eds ke media. **Editor akan lebih tertarik pada artikel yang berhubungan dengan debat yang sedang berlangsung atau membahas peristiwa yang baru terjadi (*hot issues*).** Telusuri kertas kerja untuk mencari topik yang menarik untuk ditanggapi. | **Op-Eds** anda mendukung pekerjaan yang diterbitkan media terkini, maka karya anda akan langsung menarik Editor & memiliki kesempatan untuk diterbitkan
- 2. PILIH TOPIK YANG ANDA SUKAI.** **Op-Eds** harus berisi opini yang benar-benar kuat. | Anda tidak bersemangat tentang topik yang Anda pilih, pertimbangkan memilih topik yang berbeda. | telah ditetapkan, maka rebus (matangkan) argumen Anda ke bentuk yang paling sederhana. Buat satu poin dengan jelas dalam satu atau dua kalimat. Jika Anda bisa melakukannya, Anda memiliki topik yang bagus untuk sebuah Op-Eds. Misalnya: Pasar Tradisional direncanakan akan ditutup, maka argumen anda secara historis, bahwa pasar dimaksud sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar, tidak boleh ditutup, sehingga dan malah perlu dilakukan revitalisasi.

# Menulis ARTIKEL OPINI (OP-EDS) 2

## (opposite the editorial page)

- 3. PILIH TOPIK YANG ANDA KETAHUI.** Untuk menjadi persuasif, Anda harus mengetahui apa yang dibahas (perlu dilakukan riset). Op-Eds yang diisi dengan poin valid berbasis fakta yang mendukung argumen, maka Anda jauh lebih kuat daripada opini yang hanya menyatakan sudut pandang. Berselancarlah di internet, lihat arsip, bicara dengan orang terlibat langsung, dan atur informasi tangan pertama anda sendiri. Kenapa Pasar tradisional ditutup? Bagaimana sejarah Pasar dimaksud? Berapa banyak orang yang melakukan transaksi di pasar dimaksud? Adakah komunitas pasar dan kegiatannya?. Ingatlah, bahwa Op-Eds akan lebih mungkin diterbitkan, | latar belakang dan kredensial Anda memperagakan pengetahuan tentang topik tersebut.
- 4. PILIH TOPIK YANG RUMIT.** Op-Eds yang baik tidak boleh membuka dan menutup kasus yang mudah dibuktikan atau dibantah. Tidak ada alasan untuk membaca opini tentang sesuatu yang sudah jelas, seperti apakah Alkohol/Narkoba itu sehat atau tidak. Apakah pencandu Alkohol/Narkoba harus dirawat atau direhabilitasi? Ini lebih kontroversial. **Buatlah daftar berbagai aspek dan gagasan utama dari sebuah argumen untuk memastikan argumen itu cukup rumit dalam menjamin sebuah opini.**



# Menulis ARTIKEL OPINI (OP-EDS) 3

(opposite the editorial page)

## Untuk Pasar, garis besar yang bisa dibangun dapat seperti:

- Pasar merupakan bagian vital bagi masyarakat dalam transaksi sehari-hari
- Bila Anda memiliki hubungan personal dengan pasar, dapat memasukkan kisah pribadi Anda dan menghadirkan kegiatan komunitas di pasar
- Jelajahi kemungkinan alternatif untuk menutup pasar, bagaimana komunitas dapat berperan agar pasar tetap terbuka
- Saran bagi perencanaan kota setempat.

# Bagaimana Menulis? 1

- 1. Langsung keintinya.** Tidak seperti esai, Op-Eds menempatkan argument langsung di beberapa baris pertama. Selanjutnya atur poin argument Anda, buat pembaca peduli dengan tujuan Anda, dan simpulkan apa yang menurut anda harus dilakukan tentang topik dimaksud.
- 2. Gunakanlah detail dan Contoh.** Pembaca cenderung mengingat detail menarik dari pada fakta kering dan contoh yang penuh warna. Sementara Op-Eds tidak boleh sepenuhnya mengabaikan fakta yang solid, gunakan detail yang cerah dan menarik untuk memastikan Op-Eds tetap ada di benak pembaca. Berikan contoh nyata untuk membuat pembaca melihat bahwa ini adalah topik yang layak dibaca.
- 3. Tunjukkan Kepedulian Pembaca.** Jika pembaca merasa topik yang Anda tulis tidak benar-benar memengaruhi mereka, mereka cenderung tidak akan membaca Op-Eds. Buatlah catatan pribadi untuk pembaca, jelaskan mengapa topik dan rekomendasi yang Anda sarankan tentang topik dimaksud akan memengaruhi pembaca.



## Bagaimana Menulis? 2

**4. Jadikan itu Pribadi.** Ini berarti menggunakan suara Anda sendiri untuk menyampaikan pesan Anda, dan memberikan contoh pribadi yang akan membawa pulang poin Anda. Ungkapkan kemanusiaan melalui tulisan untuk membuat pembaca terlibat dengan membaca Op-Eds Anda. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda adalah orang yang benar-benar yakin dengan topik ini.

Hindari menggunakan kalimat pasif dan jargon. Op-Eds Anda memanggil pembaca untuk mendapatkan informasi tentang topik tersebut dan melakukan sesuatu, bukan meminta mereka untuk mempertimbangkan untuk mencoba memikirkan topik tersebut. Gunakan suara aktif saat menulis. Juga perlu diingat, jangan menakut-nakuti pembaca dengan jargon teknis yang bisa dianggap sok atau membingungkan.

**Contoh *passive voice*:** "Diharapkan pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali rencananya untuk menutup pasar."

**Contoh *active voice*:** Saya berharap pemerintah daerah melihat apa arti pasar yang luar biasa ini bagi masyarakat, dan akan mempertimbangkan kembali keputusannya yang mengerikan untuk menutup pusat pasar di komunitas dan masyarakat.

## Bagaimana Menulis? 3

- 4. Rencanakan sebelumnya.** Tanyakan ke Pimpinan Pasar atau Pemkot untuk penjadwalan pertemuan, pilih tanggal dan waktu pertemuan dan undang komunitas pasar untuk membicarakan masa depan pasar. Bisa juga undang reporter untuk merekam opini orang dan dokumentasi dalam meningkatkan kesadaran.
- 5. Penting mengakui orang yang menentang pendapat.** Melakukannya akan membuat karya Anda tampak lebih menarik dan terhormat (bahkan | pihak lain terdiri dari orang-orang kurang *literated*). Akui cara oposisi benar. Sebagai contoh: Yang pasti, mereka yang ingin menutup pasar itu benar dalam berpikir bahwa ekonomi lokal tidak berjalan. Bisnis tutup, kiri dan kanan, karena orang tidak membeli barang mereka. Tetapi berpikir bahwa menutup pasar merupakan gagasan yang salah.



## Bagaimana Menulis? 4

- 4. Beri Solusi.** Sebuah Op-Eds yang hanya mengoceh dan tidak merekomendasikan solusi (atau setidaknya langkah menuju solusi) lebih kecil kemungkinannya untuk dipublikasikan daripada Op-Eds yang menemukan alternatif dan solusi. Di sinilah Anda dapat mendiskusikan peningkatan dan langkah-langkah lain yang menurut Anda dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai apa yang Anda yakini sebagai hasil terbaik.
- 5. Baca Kembali.** Seusai menulis Op-Eds, baca kembali isi seluruh Op-Eds, baru dikirim. Pembacaan ulang itu penting, guna menghindari loncatan gagasan, menemukan kalimat yang tidak "jalan/nyambung". Apakah penggunaan bahasa asing sudah ditulis dengan benar?

# KRITERIA UMUM ARTIKEL KOMPAS 1

1. Artikel harus asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, pun bukan sekadar rangkuman pendapat/buku orang lain. Apabila sebuah artikel terbukti merupakan plagiasi, maka penulis bersangkutan akan "di black-list" paling cepat satu tahun.
2. Belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain.
3. Topik yang diuraikan atau dibahas merupakan sesuatu yang aktual, relevan, dan sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.
4. Substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan komunitas tertentu. Hal ini dilandasi pengertian umum, Harian KOMPAS adalah media umum, bukan koran partai, bukan majalah vak atau jurnal dari disiplin ilmu tertentu.
5. Artikel mengandung hal baru yang belum pernah dikemukakan penulis lain, baik informasi, pandangan, pencerahan, pendekatan, saran, maupun solusinya.
6. Uraian yang disajikan bisa membuka pemahaman atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas suatu masalah atau fenomena yang berkembang di masyarakat.



## KRITERIA UMUM ARTIKEL KOMPAS 2

7. Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih. Mengapa? Jangan sampai penulis yang satu menjadi lokomotif bagi penulis yang lain.
8. Penyajian artikel menggunakan bahasa populer/luwes, mudah dipahami pembaca yang heterogen dengan latar belakang pendidikan beragam. Penyajian artikel tidak berkepanjangan. Panjang tulisan untuk:
  - ARTIKEL A, panjang 5.000-5.300 character with space (sekitar 700 kata)
  - ARTIKEL B, panjang 4.500-5000 character with space (sekitar 600 kata) ARTIKEL
  - C, panjang 4.000-4.500 character with space (sekitar 500 kata)

## MENGAPA ARTIKEL DITOLAK?

1. Artikel ditolak bila topik atau tema yang disajikan tidak aktual.
2. Artikel ditolak bila penyajiannya berkepanjangan (melebihi ketentuan)
3. Artikel ditolak bila cakupan bahasan terlalu mikro atau lokal.
4. Artikel ditolak bila konteks yang disajikan kurang jelas.
5. Artikel ditolak bila bahasa yang digunakan "terlalu tinggi", terlalu ilmiah, terlalu akademis, kurang populer dan sulit ditangkap masyarakat umum.
6. Artikel ditolak bila uraiannya terlalu sumir.
7. Artikel ditolak bila penyajian dan gaya tulisannya seperti menulis pidato, menulis makalah, atau menulis kuliah.
8. Artikel ditolak bila sumber kutipan yang diambil, kurang jelas.
9. Artikel ditolak bila terlalu banyak kutipan, sehingga artikel hanya berisi kumpulan kutipan dan tidak memunculkan pendapatnya sendiri.
10. Artikel ditolak bila alur uraian tidak runut, ide meloncat-loncat



## **PENGIRIMAN ARTIKEL**

Pengiriman artikel bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Namun yang amat penting adalah, para penulis pemula hendaknya menyertakan riwayat hidup berikut latar belakang pendidikannya, ketika mengirimkan artikelnnya.

Pengiriman artikel bisa dilakukan melalui:  
e-mail ke [opini@kompas.com](mailto:opini@kompas.com) atau [opini@kompas.co.id](mailto:opini@kompas.co.id)



# Contoh Artikel di KOMPAS

[HTTPS://KOMPAS.ID/BACA/ENGLISH/2017/08/28/DEBT-AND-SOCIAL-POLITICS/](https://kompas.id/baca/english/2017/08/28/debt-and-social-politics/)

OPINION

## Debt and Social Politics



KOMPAS/HANDINING

Non-profit organization Oxfam America in a report titled "An economy for the 99 percent", released in January 2017, states that global economic imbalances between the rich and the poor are vast, which has become more worrying.

The title of the report is in line with former president Barack Obama's remark at the UN General Assembly in September 2016 stating that: "A world in which 1 percent of humanity controls as much wealth as the other 99 percent will never be stable."

In relation to that, Oxfam in 2015 estimated that 62 people controlled assets worth US\$1.76 trillion, the equivalent of total assets owned by 3.6 billion people or half of the world's population with the lowest income (the marginal).

According to an Oxfam January 2017 report, eight people have wealth equivalent to the wealth of 3.6 billion people.

If the stark portrait of global wealth is so scary, what about in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)? The main issues in Indonesia's economic development are poverty and economic disparity.

The portrait of economic growth in September 2016 can be seen from the percentage of absolute poverty level of 10.70 percent or 27.76 million people, Gini coefficient of 0.394, open unemployment rate of 5.33 percent, or 28.01 million people, and Human Development Index (HDI) of 70.18 (Central Statistics Agency, BPS, July 2017).

While in the State Budget (APBN), the ratio of total debt to gross domestic product (GDP) is projected to reach 28.1 percent in 2017 compared to 28.3 percent in 2016, while the debt interest payment ratio to GDP reached 1.3 percent in 2016 (Finance Ministry, July 2017).

### State debt vs. sociopolitical

When state debt reached Rp 3.70 quadrillion in June 2017, the government was described as a debt-maker that endangered the economy. If we examine this matter further, government debt incurred from the issuance of Government Securities (SUNs) accounts for 80.4 percent (Rp 2.97 quadrillion) of total debt while that incurred from loans account for only 19.6 percent or Rp 727.02 trillion, which consists of foreign loans (19.5 percent) and domestic borrowing (0.1 percent).

In terms of debt management, the projected debt percentage of 28.1 percent of GDP can be categorized as safe or under control, and still far from the ceiling of 60 percent of GDP (according to Law No. 17/ 2003 on state finances). Likewise, a maximum budget deficit of 3 percent of GDP is allowed.

Thus, the government still has room to maneuver the fiscal expansion in a controlled manner. Moreover, 80.2 percent of the debt is in the form of government securities. This brings an advantage in terms of debt management, since the government can reprofile the SUNs that will mature in order to maintain cash flow and state financial liquidity. From this explanation, it can be said that the government is on track in managing state debt. Public opinion that the large amount of government debt puts the country at risk of bankruptcy is exaggerated.

So why has government debt become a social and political issue? This may be because the people are worried that it has reached quadrillions of rupiah. The large amount of debt is often compared with the degree of income inequality due to fiscal redistribution, where the pattern depends on the budgetary system adopted.

Who benefits from redistribution? What is the impact of redistribution on public and private spending? Is it true that marginalize people benefit from government programs against at them? This is a phenomenon of "icebergs", where control over capital can unexpectedly bring social instability in the long run, economic uncertainty, which in turn can trigger a new economic crisis. This is the main reason why the group that directly controls wealth can bring more inequality, and in the long run can bring sociopolitical instability.

The results of research by Alenia and Perotti (1996) suggest that sociopolitical instability increases income inequality and reduces investment. This can be seen in 71 countries taken as samples. They tested the hypothesis using investment and sociopolitical instability indices as endogenous variables in the 1960-1985 period. The research shows that it can have an impact on redistribution policy, which is fiscal redistribution through increased tax burden on the owners of capital and investors, and reducing the tendency to invest.

Other policies may reduce social tensions, which will make the political climate more conducive to productive activities and the accumulation of capital. From the channel of fiscal redistribution, economic growth can be increased. In his book *Asset Redistribution*, Siregar (2016) wrote about various poverty reduction programs implemented by the government that had been unable to solve the problem.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO  
*Manusia qerobak*, or "cart people" who often carry their children while looking for recyclable scraps, is one of the common scenes along the streets of the capital city, as



# Contoh Artikel di KOMPAS

seen on Jl. TB Simatupang, South Jakarta, Sunday (27/8). Most children of manusia qerobak do not have access to education, health, clean water or a decent place to live.

## Redistribution of assets

The redistribution of economic assets has re-emerged as a central issue, especially in response to global economic imbalances and economic imbalances of each country. As Oxfam (2015) states, global wealth is controlled by 1 percent of the world's population, which is quite worrying.

On the other hand, in many parts of the world, many marginalized people may not be able to live a decent life because of asset redistribution policies that do not support the poor or the people in general.

Iryanti (2014) of the National Development Planning Ministry/Bappenas said every country had different ways to overcome problems, depending on the size of the gap, and their difficulty levels. She further explained that the experience of some countries showed that countries with large GDP, high per capita income and relatively even distribution of income have relatively low Gini coefficients.

The World Development report submitted by Rodriguez (2000) titled "Inequality, Economic Growth and Economic Performance" showed that inequality had an effect on economic growth and economic performance. This has been further confirmed by Harford in *The Undercover Economist* (2006). Harford says economic thinkers are of the opinion that economic wealth comes from a combination of man-made resources, such as roads, factories, machinery and communication systems; human capital, such as hard work and education; and technological resources, such as technical knowhow or simple advanced technology.

Harford added that as poor countries increased their economic growth, investment in fiscal resources, through improved human capital abilities and technology resources through education and knowledge transfer programs, had become a necessity.

Harford also indicated that education, manufacturing ability, infrastructure and technical knowhow, which are abundant in rich countries, are weaknesses in developing countries, including Indonesia.

What the government does in the redistribution of assets through land distribution is one way of minimizing the gap. However, it should be in the form of the transfer of idle land ownership along with the transfer of government tax burden in the form of property tax (PBB). There is also discourse on imposing tax on idle land, which would have repercussions on economic stability. The relevant thing now is how to empower the people and make their assets more productive. After the assets become productive, the government can then start imposing taxes, not the other way around.

## Is there a solution?

Although debt management is safe and under control, many people do not realize that the debt issue can be used by certain groups to interfere with local wisdom that could lead to disorientation in development.

Various solutions may be debatable. Nevertheless, the country's main problem is limited capital (hard and soft). Limited capital brings consequences to the government's ability to build a solid economy. In terms of hard capital, can wealth be translated into assets in Indonesia, which is often called a rich country? Having a treasure does not mean having assets. Say, for example, that a woman has one kilogram of gold. Her ownership of the gold would be meaningless if it is not registered and legalized as an asset even though it could be traded. If the asset was registered and legalized, it could automatically be included as an asset, which has value.

If all the gold assets owned by Indonesians were registered and legalized, thousands of trillion of rupiah could be added to the balance sheet of banks. To make this happen, the government or the private sector could create a sort of clearinghouse that registers and legalizes gold assets.

The clearing house could function not only to register and legalize assets, but also act as a modern treasury in the form "billion system and bullion system" as part of a national financial structure that could go global. Hopefully!

**BATARA M SIMATUPANG**

*Lector at Postgraduate MM, STIE Indonesia Banking School*

# Contoh Artikel di BISNIS

Senin, 16 April 2018 | 2

OPINI

## Belajar dari Krisis dan Resesi

**D**alam sejarah perkembangan Indonesia, tantangan terbesar saat ini adalah krisis. Dari krisis yang dihadapi di tahun-tahun sebelumnya, misalnya pada 1997 (1998) dan 2008 (2009), kita bisa belajar banyak hal. Pertama, krisis yang dihadapi pada 1997-1998 adalah krisis moneter. Saat itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS jatuh drastis, mencapai 16.000 per dolar AS pada pertengahan 1998. Krisis ini dipicu oleh pelepasan nilai tukar Rupiah yang dilakukan pemerintah pada 1997-1998. Saat itu, pemerintah memutuskan untuk mengintervensi nilai tukar Rupiah dengan cara menjual cadangan devisa di pasar internasional. Akibatnya, nilai tukar Rupiah jatuh drastis dan memicu krisis moneter yang melanda Indonesia.

Krisis ini dipicu oleh pelepasan nilai tukar Rupiah yang dilakukan pemerintah pada 1997-1998. Saat itu, pemerintah memutuskan untuk mengintervensi nilai tukar Rupiah dengan cara menjual cadangan devisa di pasar internasional. Akibatnya, nilai tukar Rupiah jatuh drastis dan memicu krisis moneter yang melanda Indonesia.



**BATARA M. SIMATUPANG**  
Lektor dan Dosen di STIE Indonesia Banking School

**MOTIF KRISIS DAN RESESI**  
Krisis moneter 1997-1998, petrus perkembangan Indonesia dapat diukur sebagai berikut: PDB Rp1.184,8 triliun atau dasar harga basis tahun 1999 dengan PDB pertaksa Rp161,49 juta (1994-2008). Perhitungan standar pengalihan: 4,27%, nilai 1,11%, tingkat pengangguran sebesar 5,5%, upah minimal harian rata-rata Rp10.500 per hari.

**Indeks Harga Perdagangan Luar-Negeri** meningkat 127%, ekspor Rp161,49 miliar atau Rp13.401 atau 10,22%. Indeks Harga Saham Gabungan pada di kisaran level 1.701,42 dengan modal cap Rp3.000,13 triliun, dan harga properti residential 201,16, meningkat 5,5%.

Sementara indikator positif, bentuk ada indikator yang menunjuk kepada modal. Sebagai ekoran memajukan adanya pertumbuhan dan pembangunan secara berkelanjutan, infrastruktur, layanan yang lebih baik, dan sebagainya.

Pada dasarnya, setiap kali krisis moneter atau resesi terjadi, kita sebagai bangsa harus mampu mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah kita alami.

Dalam menghadapi krisis atau resesi, kita sebagai bangsa harus mampu mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah kita alami.



<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160811135555-79-150713/pengampunan-pajak-apbn-dan-modal-perbankan/>

Home / Ekonomi / Kolom Keuangan



## PROFILE Batara Simatupang

Dosen Magister Manajemen (MM) STIE Indonesia Banking School ini meraih gelar doktor dalam bidang keuangan dan perbankan di Maastricht School of Management, Belanda, 2007. Ia juga tercatat berkecimpung lebih dari 18 tahun di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## Pengampunan Pajak, APBN, dan Modal Perbankan

Batara Simatupang, CNN Indonesia  
Kamis, 11/08/2016 16:30 WIB



Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat sosialisasi kebijakan Amnesti Pajak di Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7). (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi).

Jakarta, CNN Indonesia -- Dampak moneter dari kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan pemerintah Indonesia masih belum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dampak itu adalah seberapa besar dana tunai yang akan mengalir ke sistem perbankan nasional.

Pemerintah menargetkan dana repatriasi dari kebijakan ini mencapai Rp1.000 triliun, namun Bank Indonesia (BI) hanya menargetkan Rp560 triliun. Dana sebesar ini pasti akan

KOMPAS, JUMAT, 30 AGUSTUS 2019

# Indonesia dalam Cengkeraman Kleptokrasi

Batara M Simatupang  
Lektor MMI Indonesia Banking School, Ketua Bidang Perbankan AIMBA

Ketua Transparency International Delia Ferreira Rubio pada 2018 mengatakan, "Korupsi jauh lebih mungkin berkembang di mana fondasi demokrasi lemah, dan seperti yang telah kita lihat di banyak negara, di mana politisi yang tidak demokratis dan populis dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka."

Transparency International juga merilis pada awal 2019 bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 menduduki peringkat ke-89 dengan skor 38, meningkat satu angka dari tahun 2017 dan 2016 dengan skor 37, dan naik dua angka dari 2015 dengan skor 36. Artinya, selama empat tahun, Indonesia hanya mampu mencetak perbaikan IPK sebanyak dua skor, suatu upaya perbaikan panjang yang sangat sulit.

### Skor Indonesia

Di lingkungan Asia Pasifik, IPK Indonesia 2018 menduduki peringkat ke-14. Bahkan, kita kalah dengan negara tetangga, seperti Singapura yang berada di peringkat ke-1 dengan skor 85, Australia peringkat ke-2 dengan skor 77, Brunei Darussalam peringkat ke-6 dengan skor 63, Malaysia peringkat ke-9 dengan skor 47, Vanuatu peringkat ke-10 dengan skor 46, Kepulauan Solomon peringkat ke-11 dengan skor 44, India peringkat ke-12 dengan skor 41, dan China peringkat ke-13 dengan skor 39.

Dengan angka skor 44 dari maksimum 100 (skala 0-100, di mana skor 0 paling koruptif dan skor 100 paling tidak koruptif),

dapat diartikan bahwa Indonesia masih terjebak dalam pusaran kleptokrasi yang parah. Hal ini menjadi antitesis, di mana suatu tatanan negara yang berlandaskan negara demokrasi seyogyanya bisa mencapai skor IPK mendekati skor 100, tetapi justru Indonesia terjebak dalam kubangan kleptokrasi dengan IPK Indonesia berskor 38.

Dalam perspektif etymology dictionary, kleptokrasi (*kleptarchy*) adalah bentuk korupsi politik dan pemerintahan, di mana pemerintah ada untuk meningkatkan kekayaan pribadi dan kekuatan politik pejabat dan kelas perusahaannya dengan mengorbankan populasi yang lebih luas, sering kali dengan keputus-putusan yang merugikan yang jujur. Jenis korupsi pemerintah ini sering dipicu dengan penggelapan dana negara. Penggelapan keuangan negara adalah bagian dari delik korupsi yang memperkaya diri, kelompok atau perusahaan secara legal.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (2/8/2019) mengatakan, "Dulu kita sulit menjalankan ekonomi karena negeri kita negara korup. Begitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Jusuf Agung memberantasnya, di Indonesia sudah ada 10 menteri masuk penjara dan 20 gubernur." Terasa sandungunya begitu banyar pejabat dengan KPK merupakan indikator negara dalam cengkeraman kleptokrasi. Beberapa pejabat negeri, seperti Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga; dan juga beberapa direksi BUMN, seperti Direktur Utama PLN, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, kesemuanya terduga tersandung pada perilaku kleptokrasi yang koruptif.

Sejarah apa sesungguhnya cengkeraman kleptokrasi di Indonesia bisa kita susuri dari buku ke hilir bagaimana kegiatan ekonomi berjalan di Republik ini. Kegiatan ekonomi yang berjalan dewasa ini tentunya berjalan sesuai dengan tata laksana hukum ketatanegaraan, dengan hadirnya trias politika, yaitu adanya lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR dan DPRD), dan yudikatif (kehakiman, Kejaksaan,

an, kepolisian, serta Bea dan Cukai dengan berbagai perangkat pendulangannya).

Namun, fakta menunjukkan, komponen trias politika dimaksud tidak bebas dari perilaku kleptokrasi. Setiap komponen memainkan perannya dalam melakukan kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa yang dapat dipotret dari versi statistik KPK tentang tindak pidana korupsi (TPK) selama 2004-2018 diuraikan berdasarkan profesi dari yang tertinggi ke yang rendah secara berturut-turut, yaitu profesi anggota DPR dan DPRD (247 orang), swasta (238 orang), eselon I/II/III (199 orang), lain-lain (109 orang), wali kota/bupati dan wakil wali kota/bupati (101 orang), hakim (22 orang), gubernur (20 orang), pengacara (11 orang), komisio-ner (7 orang), jaksa (7 orang), korporasi (5 orang), duta besar (4 orang), dan polisi (2 orang). Secara total telah terjaring sebanyak 998 orang.

Sementara berdasarkan jenis perkara sejak 2004-2018, secara berurutan dari yang tertinggi ke yang rendah adalah 1) penyusupan (564 perkara), 2) pengadaan barang/jasa (188 perkara), 3) penyalahgunaan anggaran (46 perkara), 4) TPPU (31 perkara), 5) pengantian (25 perkara), 6) perizinan (23 perkara), dan 7) merintang proses KPK (10 perkara). Sementara TKP atas dasar instansi/lembaga didominasi yaitu D kementerian/lembaga (321 perkara), 2) pemerintah kabupaten/kota (295 perkara), 3) pemerintah provinsi (128 perkara), 4) DPR dan DPRD (67 perkara), 5) BUMN/BUMD (56 perkara), 6) komisi (20 perkara).

Gambaran di atas baru data yang terungkap dari KPK, belum lagi data yang terungkap dari kepolisian dan Kejaksaan yang tentu lebih banyak lagi.

### Memerangi kleptokrasi

Presiden Joko Widodo dalam "Pidato Visi Indonesia" (14/7/2019) menegaskan dengan berapi-api, ia menginginkan "birokrasi di Indonesia betul-betul efisien dan melayani rakyat. Secara eksplisit ini adalah pernyataan perang terhadap



perilaku kleptokrasi. Wibawa negara harus ditegakkan, pemerintah harus mampu mengidasi semua pengaruh perilaku kleptokrasi, bahkan perang total terhadap kuasa kleptokrasi.

Sesuai dengan Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab I, Pasal 1, Ayat 3, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK di- bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4). Idealnya setiap insan

Indonesia memahami, mengetahui, dan memiliki "ruh" yang melekat (*embeded*) tentang "apa itu tindak pidana korupsi?". Dengan adanya persepsi yang sama terhadap tindak pidana korupsi, pelaksanaan pemberantasan korupsi akan semakin terarah, tepat sasaran, efisien, dan efektif. KPK juga berfungsi sebagai *trigger mechanism* atau lembaga pendorong bagi lembaga yang sudah ada dalam memerangi korupsi, baik secara sistem maupun perilaku kleptokrasi dari aparat.

Korupsi merupakan "kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)" yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok, orang lain, dan perusahaan secara legal. Setiap warga negara harus memaknai secara mendasar bahwa korupsi adalah juga tindakan yang menocorlari nilai-

nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan tindakan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, maka upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peran KPK harus dikedepankan.

Memurut Soekanto (2010: 212-213), "Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan." Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, bilamana individu atau suatu lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka individu atau lembaga dimaksud telah menjalankan perannya. Sesuai dengan UU No 30/2002 tentang KPK Pasal 3, KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugasnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Juga secara tegas dinyatakan, KPK adalah lembaga negara, bukan lagi sebagai badan *ad hoc* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan perannya, KPK harus merujuk pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, yaitu "Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, KPK harus menjadikan hukum sebagai panglima yang memiliki nilai keadilan. Karena tanpa keadilan sebagai tujuan *ultimate*, hukum bisa terprosok menjadi alat pembenaran kesewenangan-wenangan penguasa (perilaku kleptokrasi). Jadi fungsi utama dari hukum adalah menegakkan keadilan (Kusumahandjito, 1999: 126).

Cengkeraman kleptokrasi terjadi dalam hubungan segitiga, yaitu antara negara, pengusaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, KPK harus mampu menjadi bagian dari legalisasi kleptokrasi.

lam menerima pengaduan dan melakukan investigasi terhadap praktik-praktik korupsi, baik di sektor publik maupun swasta, meninjau ulang prosedur administrasi di kementerian/lembaga untuk mengeliminasi terjadinya praktik korupsi. Secara undang-undang, KPK memiliki kewenangan politik sehingga KPK harus mampu memainkan independensinya dalam melaksanakan strategi dan manajemen KPK secara simultan.

Juga diperlukan percepatan sinkronisasi dan inisiatif global terkait sektor jasa keuangan dan perpejalangan, antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, PPATK, perbankan, Kejaksaan Agung, Polri, Kehakiman, dan KPK, khususnya dalam menangani *hidden-crime* pada lembaga jasa keuangan, baik dalam langkah preventif maupun tindakan represif, harus segera.

Demikian juga dengan peminatannya terhadap korporasi secara serius, karena dampaknya bisa mencapai sepuluh kali lipat dari pidana biasa, juga untuk menjamin bebas *fraud* dan korupsi; serta penyelesaian segera terhadap aset-aset yang dinyatakan status hukumnya sudah linah, menclupk penyitaan dan pelepasan yang ada di dalam dan luar negeri.

Terakhir, memprioritaskan segera masalah hukum yang sudah masuk dalam investigasi dan penyelidikan oleh KPK, terutama kasus-kasus megaskandal, seperti HLBH, KLBI, rekaptalisasi perbankan, kasus Bank Century, klaim-klaim kepemilikan dana oleh masyarakat yang tidak bisa diairkan (tabungan, deposito, obligasi, *asset paper* lainnya, dan juga dana-dana yang tidak bertuan di perbankan). Bahkan juga terhadap dana-dana milik korban bencana seperti tsunami Aceh yang tidak jelas yang ada di perbankan nasional, hanya akibat adanya diskresi dan inkonsistensi kebijakan, dana dimaksud menjadi bagian dari legalisasi kleptokrasi.



# Contoh Artikel di BISNIS

# Contoh Artikel di CNN

Bisnis Indonesia,  
Rabu, 11 Juli 2012

OPINI

2

## Deja Vu Obligasi Rekapitalisasi

Pemerintah Seyogianya Segera Meninjau Ulang Kebijakan Masa Lalu

Batara Maju Simatupang  
Assistant Vice President PT Bank Mandiri  
The Harbor Wilayah III Jayapura.

Biaya krisis ekonomi pada 1997-1998 mencapai Rp658,72 triliun atau setara dengan 51,03% dari GDP Indonesia pada 2000. Ini merupakan salah satu biaya krisis terbesar di jagat ini.

Sebesar Rp430,4 triliun (67%) dialokasikan untuk merekapitalisasi perbankan nasional (36 bank), jumlah yang bersifat ini terkait dengan *too big to fail* yang sangat dibiarkan gagal dan penting diselamatkan.

Dalam disertasi Simatupang (2007) yang berjudul *Bank Recapitalization, Bank Performance and Real Sector: An Analysis of Indonesia's Economic Recovery from the Crisis of 1997-1998*, disimpulkan bahwa dampak kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia hingga 5 tahun pascakrisis telah mampu memperbaiki kinerja perbankan nasional secara individual.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kinerja bank yang baik itu hanya menjadi ilusi dalam pemulihan ekonomi.

Terbukti, kebijakan dimaksud hanya signifikan mempertahankan kinerja untuk beberapa sektor ekonomi, a.l. agrikultur, pertambangan, listrik, air dan gas, perhotelan, hotel dan restoran. Reanimasi sektor ekonomi lainnya tidak signifikan memperbaiki kinerja perekonomian, bahkan stagnan dan menurun.

### Obligasi Rekapitalisasi

Sekali kita meninjau ulang kembali atau *deja vu* tentang kejadian krisis pada 1997-1998, krisis ekonomi yang melanda Indonesia adalah akibat krisis nilai tukar yang merambat ke krisis perbankan dan krisis ekonomi.

Model krisis yang melanda Indonesia kala itu adalah model krisis generasi ketiga, tepatnya

krisis perbankan yang dipicu oleh krisis nilai tukar yang dibarengi moral hazard.

Krisis nilai tukar yang mendera disebabkan BI tidak mampu meredam kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap US\$ hingga membuat perbankan kelumpungan.

Ketika itu perbankan sempat menyerap pinjaman yang masif dan menyalurkan kredit ke berbagai sektor dengan tingkat risiko yang tinggi. Selanjutnya terjadilah permasalahan *transfer and balance sheet* pada perbankan.

Masalah ini menyangkut perilaku arus modal masuk yang besar dengan arus keluar modal yang cepat mengakibatkan terjadinya krisis dalam *capital account*.

Dampak yang sangat berbahaya dari arus modal keluar adalah pada penyehatan kredit besar yang tidak terkontrol (*financial bubbles*) dan disusul dengan krisis *capital account* disebabkan mata uang yang *mismatch* (utang didominasi oleh mata uang yang tidak di *hedge*).

Dijungunya, terjadilah krisis utang bagi perbankan yang disebabkan oleh kejatuhan kolektivitas kredit secara dramatis.

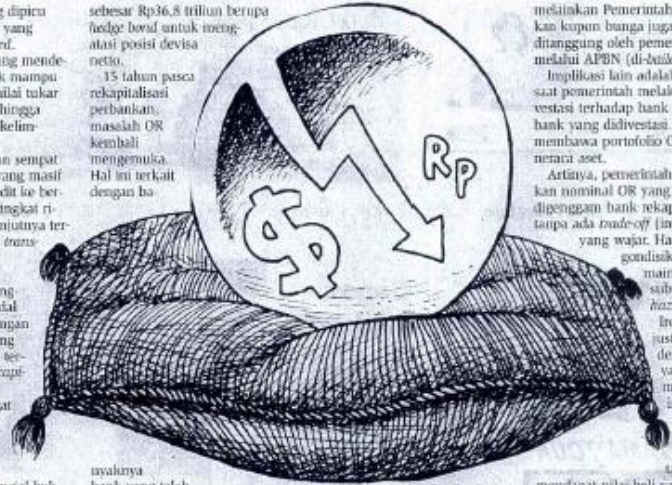
Krisis ini menimbulkan krisis modal bagi perbankan. Krisis ini akhirnya melahirkan program rekapitalisasi perbankan. Adapun alokasi distribusi obligasi rekapitalisasi (OR) dalam program rekapitalisasi dikelompokkan dalam empat kategori a.l. Bank BUMN sebesar Rp282,92 triliun untuk 4 bank.

Bank Taken Over (BTO) sebesar Rp128,41 triliun untuk 13 bank; Bank Kategori B (-25% < CAR < 4%) sebesar Rp17,86 triliun untuk 7 bank; dan Bank BPD sebesar Rp1,23 triliun untuk 12 bank.

Utang obligasi rekapitalisasi sebesar Rp140,43 triliun untuk 36 bank; dengan imbal hasil dari pemerintah obligasi rekapitalisasi sebesar Rp167,2 triliun diberikan *float rate*, sebesar Rp226,3 triliun diberikan imbal hasil *variable rate*, dan

sebesar Rp36,8 triliun berupa *hedge bond* untuk mengantisipasi posisi *devisa* neto.

15 tahun pasca rekapitalisasi perbankan, masalah OR kembali mengemuka. Hal ini terkait dengan ba-



nyalunya bank yang telah melego OR yang di milikinya di pasar sekunder, ditambah lagi terjadinya penutupan tingkat suku bunga pasar.

Kondisi itu membuat pemegang OR yang imbal hasilnya *variable rate* akan kelumpungan, karena pemasangan dari imbal balik atas aset kosong (keberadaannya hanya secara akuntansi) akan menurun secara dramatis.

Kendati beberapa bank memiliki OR yang berstatus *available for sale* (AFS), bank masih menakar-nakar mata dikemungkinan OR tersebut karena saat ini tingkat suku bunga OR *variable rate*, mengacu pada kupon bunga patokan hasil leasing SPN (Surat Utang Negara) 3 bulanan oleh BI.

Semakin lama OR ditahan pada tingkat suku bunga kupon dimaksud, akan semakin mengkilas pendapatan bunga bank dari OR. Belum lagi OR yang berstatus *hold to maturity* (HTM) masih mendominasi portofolio bank dan belum dapat dilego, karena statusnya harus diubah dahulu menjadi AFS.

Namun perubahan dimaksud tidaklah mudah, karena akan menimbulkan persoalan baru dalam hal reklasifikasi aset dan

meitikan Pemerintah RI, bahkan kupon bunga juga harus ditanggung oleh pemerintah RI melalui APBN (di-*backed*).

Implikasi lain adalah pada saat pemerintah melakukan divestasi terhadap bank rekap, bank yang didivestasi masih membawa portofolio OR dalam neraca aset.

Artinya, pemerintah membiarkan nominal OR yang tengah digenggam bank rekap dibawa tanpa ada *trade-off* (imbal balik) yang wajar. Hal ini mengondisikan bersemainya dengan *subur moral hazard*.

Ironinya, justru kondisi demikianlah yang dikukuhkan para investor saat bank rekap didivestasi. Mereka

mendapat nilai beli yang rendah, dengan aset tak berisiko plus bunga, tanpa harus menggeletakkan kredit. Bahkan kini beberapa bank rekap yang neracanya bersih dari OR sudah melayang menjadi milik asing.

Mengingat solusi OR merupakan pekerjaan moral yang harus dirampungkan, pemerintah seyogianya segera meninjau ulang kebijakan masa lalu *deja vu* untuk solusi OR agar beban APBN dapat berkurang.

Yang perlu diperhatikan dalam solusi adalah pemerintah harus mengimajinasikan kembali nominal basis pencairan aset kredit oleh *almatubun* BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional) untuk mengurangi nominal OR yang digegang oleh bank penerima OR.

Selanjutnya selisih OR yang dipegang oleh bank rekap, wajib dibeli secara terjadwal oleh bank rekap, termasuk bank yang sudah bersih neracanya dari OR. Caranya dengan membebaskan *buy back* OR kepada bank rekap melalui *perpajakan* *dividen*nya setiap tahun hingga tuntas.

Caru ini lebih beresdiliikan dan menjadi kunci keberhasilan dalam penyelesaian OR untuk mengurangi beban APBN.



Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup CNN TV

Home > Ekonomi > Keuangan



Batara Simatupang

Dosen Magister Manajemen (MM) STIE Indonesia Banking School ini meraih gelar doktor dalam bidang keuangan dan perbankan di Maastricht School of Management, Belanda, 2007. Ia juga tercatat berkecimpung lebih dari 18 tahun di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

KOLOM

## Pemilik Rekening Terbesar di Bank RI dan Jurus Tolak Bangkrut

Batara Simatupang | CNN Indonesia

Selasa, 26 Jul 2020 08:31 WIB

Bagikan :



Jakarta, CNN Indonesia -- Setiap 1 Juli, **Bank Dunia** memiliki tradisi memperbaharui klasifikasi pendapatan negara-negara di dunia berdasarkan **Gross National Income** atau GNI. Dan kali ini, lembaga tersebut membuat empat kelompok.

Mereka terdiri dari negara berpenghasilan rendah (US\$1.036 dari US\$1.026); berpenghasilan rendah menengah (US\$1.036-4.045 dari US\$1.026-US\$3.995); berpenghasilan menengah atas (US\$4.046-US\$12.535 dari US\$3.996-US\$12.375); serta berpenghasilan tinggi (US\$12.535 dari US\$12.375).

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan pada beberapa faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan pertumbuhan penduduk.



Renovasi  
Atap Lama,  
Sekali Beli  
Keren  
Selamanya



# AGENDA

1

PEMILIHAN TOPIK

2

PENULISAN

3

KESIMPULAN



1. Selesaikan dengan kuat. Untuk melengkapi Op-eds, diperlukan paragraf akhir yang solid untuk mengulangi argumen dan membawa artikel Anda ke kesimpulan yang baik yang akan tetap ada pada pembaca setelah mereka meletakkan Op-Eds dimaksud. Sebagai contoh: Pastikan kalimat terakhir, sertakan tindakan spesifik yang dapat dilakukan pembaca setelah menyelesaikan artikel Anda.
2. Ingatlah jumlah kata. Secara umum, jaga agar kalimat dan paragraf tetap pendek dan manis. Secara umum, andalkan kalimat deklaratif pendek dan sederhana untuk menyampaikan maksud dalam Op-Eds. Setiap surat kabar berbeda, tetapi sebagian besar memiliki jumlah kata maksimum 750 yang tidak dapat Anda lewati dalam Op-Eds. Surat kabar hampir selalu akan mengedit, tetapi biasanya akan mempertahankan suara, gaya, dan sudut pandang artikel Anda. Namun, ini tidak berarti kita dapat mengirim potongan yang panjang dan mengandalkan mereka untuk memotongnya sesuai keinginan mereka.

3. Jangan habiskan waktu mengkhawatirkan judul. Surat kabar akan membuat headline untuk Op-Ed, terlepas dari apakah kita mengirimnya bersama dengan artikel atau tidak.
4. Periksa fakta, sertakan bio singkat tentang diri Anda yang menghubungkan dengan topik yang ditulis dan membangun kredibilitas Anda.
5. Tawarkan grafik apa pun yang mungkin Anda miliki. Secara historis, halaman Op-Eds hanya memiliki sedikit gambar. Sekarang, dengan surat kabar berubah menjadi publikasi online, foto, video, dan media lain yang sejalan dengan opini, dapat diterima secara luas.
6. Periksa pedoman pengiriman dengan seksama. Setiap surat kabar akan memiliki persyaratan dan pedomannya sendiri tentang cara mengirimkan karya Anda dan informasi apa yang harus Anda kirimkan bersamanya, dan cari informasi pengiriman di halaman Opini.



# terima kasih . . .

## PERBANKAN DIGITAL: MENUJU BANK 4.0

Perkembangan bisnis perbankan digital dan *fintech* saat ini sedang menuju Revolusi 4.0, dan ini merupakan *unavoidable era*. Konsekuensinya, pada level pertama setiap insan atau *user* mesti menerima pengetahuan digital yang diperlukan dalam transaksi sehari-hari; pada level kedua kalangan profesional wajib memahami dan dapat menjalankan aplikasi digital dengan prima; dan pada level ketiga pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, regulasi, dan pengelola sistem pembayaran digital dan *fintech* mampu menjalankan sistem, mengatur, mengawasi, dan melindungi *customer* dan *consumer*.

Peran digitalisasi dan *fintech* secara sistem pembayaran dikelola oleh Bank Indonesia (BI) dan secara bisnis berada di bawah payung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila dipetakan, kegiatan usaha yang berada pada payung OJK berada pada Revolusi 3.0, sementara *fintech* berada pada Revolusi 3.5. Secara paralel, institusi jasa keuangan yang ada dalam lingkup OJK dan bisnis *fintech* tengah bertransformasi menuju Revolusi 4.0.

Buku ini membahas sistem pembayaran; apa dan bagaimana perbankan digital saat ini dan di masa yang akan datang, utamanya dalam menyongsong Revolusi 4.0; serta bagaimana perbankan masa depan menjadi Bank 4.0. Beberapa paparan akan mengadopsi bagaimana perbankan di Indonesia menjalankan bisnisnya dengan produk perbankan digital. Sebagai pendalaman riil, akan diketengahkan beberapa studi kasus perbankan digital, antara lain bagaimana Bank Mandiri menoreh karya kekiniannya dengan mengembangkan perbankan digital dan juga bagaimana Citibank membangun perbankan digital dalam melayani nasabahnya.

Penerbit  
PT Gramedia Pustaka Utama  
Kompas Gramedia Building  
Blok 1, Lt. 5  
Jl. Palmerah Barat 29-37  
Jakarta 10270

[www.gp.com](#) [@gramedia](#) [@gramedia](#)

BANKING 150  
Harga Rp. Jawa Rp.

PERBANKAN DIGITAL: MENUJU BANK 4.0

Dr. Ir. Batara M. Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA

## PERBANKAN DIGITAL: MENUJU BANK 4.0



Dr. Ir. Batara M. Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA



## Kelas Seri Klinik Opini Kompas

Senin-Rabu, 29-31 Agustus 2022 | Pk. 14.00-16.00 WIB

Tidak mudah menembus rubrik opini, baik di Kompas maupun pelbagai media lainnya. Di media arus utama, halaman opini memang menjadi rubrik bergengsi dengan standar tinggi.

Jadi harus bagaimana?

Kuncinya tentu saja jangan menyerah. Perbaiki sesuai saran redaksi, banyak membaca, dan... coba lagi, lagi, dan lagi.

Selanjutnya, memang kita harus belajar kiat-kiatnya. Bersama para Wartawan Kompas yang sudah berpengalaman mengkurasi tulisan-tulisan di Rubrik Opini, kita bisa mengenal, belajar, dan berupaya agar tulisan bisa dimuat.

Pada **sesi pertama**, peserta belajar menulis dasar: memilih dan menentukan topik, mengumpulkan data dan bacaan pendukung, serta menuliskannya secara naratif. **Sesi kedua** peserta belajar menulis opini secara mendalam, tajam, dan bermakna. **Sesi ketiga** mengenal Opini Kompas: kebijakan dan implementasinya pada tulisan.

### Menulis Opini untuk Pemula

Senin, 29 Agustus 2022



**Yohanes Krisnawan & Yovita Arika**

Wakil Kepala Desk Opini Harian Kompas

### Menulis Opini Lanjutan: Lebih dalam, Lebih tajam

Selasa, 30 Agustus 2022



**Agnes Aristiarini**

Wakil Kepala Desk Opini Harian Kompas

### Menembus Opini Harian Kompas

Rabu, 31 Agustus 2022



**Sri Hartati Samhadi**

Kepala Desk Opini Harian Kompas

#### Pendaftaran:

8-30 Agustus 2022

 [institute.kompas.id](https://institute.kompas.id)

Investasi per Kelas

**Rp 500.000,-**

Investasi Seri 3 Kelas

**Rp 1.200.000,-**

#### Pendaftar Awal:

8-13 Agustus 2022

**Rp 350.000,-**  
per Kelas

Termasuk e-sertifikat dan langganan Kompas.id 3 bulan

**DAFTAR SEKARANG**

 [kompas.institute@kompas.com](mailto:kompas.institute@kompas.com)  
 [event.kompas.id](https://event.kompas.id)  0812-9005-0800

 [kompas\\_institute](https://www.instagram.com/kompas_institute)  
 [kompasinstitute](https://www.facebook.com/kompasinstitute)  
 [kompasinstitute](https://twitter.com/kompasinstitute)

Pada dasarnya setiap keputusan harus didasari data yang akurat agar hasil yang diinginkan tercapai. Melalui penelitian (riset) yang tepat, para pengambil keputusan dapat menemukan variabel yang memengaruhi baik atau tidaknya keputusan yang akan diambil. Jadi, mereka dapat mengambil keputusan yang tepat

Tidak mudah menembus rubrik Opini, baik di Kompas maupun pelbagai media lainnya. Di media arus utama, halaman Opini memang menjadi rubrik bergengsi dengan standar tinggi. Jadi, harus bagaimana? Kuncinya tentu saja jangan menyerah. Perbaiki sesuai saran Redaksi, banyak membaca, dan... coba lagi, lagi, dan lagi.



# Growth Mindset vs Fixed Mindset

WEBINAR NASIONAL  
Kolaborasi Riset Internasional,  
Penulisan Opini Ilmiah dan Growth Mindset



Pemateri - Dr. Dian Wulandari, M.Pd

	Fixed Mindset	Growth Mindset
Kapasitas	Tetap, terbatas	Tidak diketahui, perlu diungkap
Kapabilitas, kemahiran	Terberi, menetap, tidak perlu dilatih	Bisa dikembangkan, perlu ditemukan, dilatih
Usaha	Sia-sia	Membantu solusi, meningkatkan ability
Kesalahan/ kemunduran	Disembunyikan, karena kelemahan, bukti tidak cerdas	Ajang belajar, kesempatan memperbaiki, gunakan strategi lain
Sukses	Pembuktian bakat, kecakapan, kepintaran	Hasil belajar dan peningkatan kecakapan
Teman berbakat	Terlahir cerdas → gampang untuk sukses	Ingin tahu bagaimana mereka melakukannya, mencoba
Desire	Bertahan pada apa yang sudah diketahui, mahir atau tidak	Ingin belajar hal baru, bersedia mengambil resiko
Feedback	Dihindari, membosankan	Bermanfaat untuk memperbaiki
Tantangan	Dihindari	Dihadapi, dikelola